

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI DKI JAKARTA**

Oleh:

IKA SARTIKA

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ikasartika@upm.ipdn.ac.id; sartika_kharie@yahoo.com

Abstract

Urban Community Empowerment Program (UCEP) is one of the national programs targeting poor people who live in urban areas. In its implementation often occur several problems that interrupt the program. This study aimed to evaluate the implementation of the program comprehensively, especially with regard to the implementation of this program in the field in accordance with the guidelines that have been defined. The study was conducted in Jakarta as the largest city in Indonesia, and the results are expected to be the benchmark for the implementation of this program in other big cities in Indonesia. This research was conducted with a qualitative analysis approach based on context, input, process, and product. The evaluation result determined that UCEP in DKI Jakarta has been well implemented, because the availability of manuals, adequate budget, and community involvement already exists although still to be improved, while the things that still low are: the manual is still normative, the budget allocation less realistic, the role of the facilitator is too dominant, and community participation still needs to be improved. The implementation phase of UCEP has been running well, although the quantity can be fulfilled, but the quality still needs to be reviewed.

Keywords: context, evaluation, input, process, product, Urban Community Empowerment Program

1. Pendahuluan

Jakarta, seperti halnya kota-kota besar lainnya telah lama menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan penduduk mencapai 9.607.787 jiwa pada tahun 2010 (BPS, 2010). Pada tahun 2015 diperkirakan akan menduduki tempat kelima dalam 10 besar kota-kota besar di dunia. Kondisi ini mengakibatkan perpindahan penduduk menuju kota cenderung tidak terkendali yang menghambat penyelenggaraan pembangunan (Permana, 2010).

Pada hari-hari arus balik lebaran, Jakarta kebanjiran pendatang dari daerah. Menurut perkiraan Pemerintah DKI Jakarta, setelah lebaran penduduk DKI Jakarta bertambah sekitar 250 ribu jiwa baik untuk mencari kehidupan baru di Jakarta, maupun sebagai tempat transit menuju kota-kota lain. Kebanyakan para pendatang hanya berbekal tekad tanpa keterampilan yang memadai. Lapangan pekerjaan di Jakarta yang terbatas diperebutkan dengan ketat. Sehingga tidak mengherankan bila para pendatang ini harus tinggal di kolong jembatan dan gubuk-gubuk liar menjadi pengemis dan gelandangan di jalanan.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan SD ke bawah, kenaikannya mencapai 3,00 persen yaitu dari 4,19 persen (Februari 2011) menjadi 7,20 persen (Februari 2012). Sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP dan SLTA Umum kenaikannya adalah 1,90 persen dan 2,08 persen. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan dan Diploma serta Universitas mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan mengalami penurunan sebesar 3,91 persen, yaitu dari 15,31 persen pada Februari 2011 menjadi 11,44 persen pada Februari 2012. Begitu pula pada tingkat pendidikan Diploma dan Universitas, tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,91 persen, yaitu 12,88 persen pada Februari 2011 menjadi 9,97 persen pada Februari 2012. Data lengkap bisa dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,
2011-2012 (Persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Februari 2011			Februari 2012		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD Ke Bawah	5,43	2,71	4,19	12,19	0,76	7,20
SLTP	6,66	6,38	6,53	9,69	6,99	8,61
SMA UMUM	10,46	20,42	13,17	9,16	25,78	15,07
SMA KEJURUAN	14,75	16,61	15,35	10,90	12,44	11,44
DIPLOMA DAN UNIVERSITAS	8,37	18,30	12,88	5,78	15,74	9,97
Jumlah	9,67	12,71	10,83	9,34	12,86	10,72

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2012

Selain masalah pengangguran, masalah kemiskinan di DKI Jakarta juga merupakan persoalan utama. Dengan menggunakan garis **kemiskinan** Rp 379.052,- per kapita sebulan, maka penduduk miskin 363,4 ribu dan tingkat **kemiskinan** 3,75%. Ada tiga alasan utama yang mengharuskan kemiskinan mendapatkan perhatian utama. Pertama, kemiskinan yang ekstrem menghasilkan inefisiensi ekonomi. Jumlah kemiskinan yang tinggi menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit. Lebih lanjut, tingkat tabungan secara keseluruhan dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan marjinal tertinggi ditemukan pada kelas menengah. Kedua, kemiskinan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketiga, kemiskinan yang ekstrem dipandang tidak adil. Kemiskinan yang ada disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural bagi kaum miskin untuk mengakses sumber-sumber kekayaan, sedangkan golongan kaya karena faktor keturunan dan aset dengan mudah mendapatkan kekayaan.

Oleh karena permasalahan kemiskinan begitu luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan serta membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Untuk meningkatkan

efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan mulai tahun 2007.

PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program nasional dengan sasaran masyarakat miskin yang berdomisili di perkotaan. Khusus DKI Jakarta namanya Peningkatan Mata Pencarian Keluarga (PMPK) yang ada di tiap-tiap kelurahan. PMPK adalah serangkaian kegiatan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM agar mampu mengelola aset sumber penghidupannya untuk peningkatan mata pencaharian secara berkelanjutan. PMPK ini salah satu komponen PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan pada peningkatan mata pencaharian bagi warga miskin yang terhimpun dalam KSM. Program lainnya yang juga dibiayai oleh PNPM Mandiri Perkotaan DKI Jakarta adalah pembuatan drainase, jembatan, MCK, gerobak sampah, penerangan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan saluran pembuangan limbah.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seringkali terjadi beberapa permasalahan yang mengganggu jalannya program. Keluhan yang muncul adalah masih adanya masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh program ini. Kesulitan memetakan masyarakat miskin di DKI Jakarta memang menjadi masalah yang seringkali dihadapi. Akurasi data tentang tingkat kemiskinan masyarakat menyebabkan pemetaan masyarakat yang perlu dibantu menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini berakibat pada kurang tepatnya penentuan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diikutsertakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan selama ini cenderung dilaksanakan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Seperti pada tahun 2010 program ini sempat terhenti karena dana tidak cair, secara otomatis beberapa target pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Masyarakat miskin sekali lagi merasa belum sepenuhnya dilibatkan, sehingga ada kesan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan eksklusif, artinya hanya pihak-pihak tertentu yang dilibatkan.

Untuk membuktikan dugaan-dugaan di atas, maka sudah sewajarnya jika pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta dievaluasi secara komprehensif, terutama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PNPM di lapangan sesuai dengan

pedoman yang sudah ditetapkan. Dengan demikian dapat dilihat penyebab gagal atau bahkan berhasilnya PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. Dengan kata lain bisa dibuat rekomendasi pelaksanaan program sejenis untuk masa yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta.

2. Tinjauan Umum Tentang Model *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*)

Model evaluasi *CIPP* pertama kali dikemukakan oleh Stufflebeam, D.L. & Coryn, C.L.S. (2014) adalah kerangka kerja komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif terhadap program, proyek, personil, produk, organisasi, kebijakan, dan sistem evaluasi. Pada dasarnya, model ini memberikan arahan untuk menilai konteks (dalam hal kebutuhan perusahaan akan koreksi atau perbaikan); masukan (strategi, rencana operasional, sumber daya, dan kesepakatan untuk melanjutkan intervensi yang dibutuhkan); proses (implementasi dan biaya intervensi); dan produk (hasil positif dan negatif usaha)

Konsep inti model *CIPP* adalah evaluasi konteks, masukan, proses, dan produk entitas, seperti yang dilambangkan dengan huruf akronim. Dari sisi konteks, evaluator menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang, ditambah kondisi kontekstual dan dinamika yang relevan. Pengambil keputusan menggunakan evaluasi konteks untuk menentukan tujuan dan menetapkan prioritas dan memastikan sasaran program ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan dan masalah yang signifikan.

Dari sisi masukan, evaluator membantu perencanaan program dengan mengidentifikasi dan menilai alternatif, menilai rencana prosedural, ketentuan kepegawaian, dan anggaran untuk kelayakan dan potensi efektivitas biaya sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang ditargetkan untuk mencapai tujuan.

Dalam evaluasi proses, evaluator memantau, mendokumentasikan, menilai, dan melaporkan pelaksanaan rencana program. Evaluator tersebut memberikan umpan balik sepanjang pelaksanaan program dan kemudian melaporkan sejauh mana program tersebut dilaksanakan sesuai yang diminta.

Selanjutnya dalam evaluasi produk, evaluator mengidentifikasi dan menilai biaya dan hasil jangka pendek dan jangka panjang. Mereka memberikan umpan balik selama pelaksanaan program sejauh tujuan program ditangani dan dicapai. Pada akhir program, evaluasi produk membantu mengidentifikasi dan menilai berbagai pencapaian program.

Model ini sangat sesuai digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan PNPM MP di DKI Jakarta, berdasarkan konteks, input, proses, dan produk. Dengan menggunakan model ini seluruh aspek dalam pelaksanaan program dapat dilihat pencapaiannya. Upaya perbaikan dapat difokuskan pada masing-masing aspek.

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dari sisi *context*, *input*, *process*, dan *product*.

B. Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep

Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan difokuskan pada tahapan kegiatan di tingkat masyarakat (RW dan Kelurahan). Sedangkan model evaluasi yang digunakan adalah model *CIPP* (*Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*), dengan alasan model ini sesuai digunakan untuk mengevaluasi program yang sedang berjalan tanpa menunggu program selesai dilaksanakan. Pelaksanaan setiap tahapan ditanyakan kepada responden, sehingga tergambar hasilnya dari sisi *CIPP*.

Supaya dapat dilakukan pengumpulan data di lapangan, selanjutnya definisi konsep di atas dioperasionalkan seperti dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta	1. <i>Context</i>	Latar belakang dan tujuan setiap tahapan kegiatan
	2. <i>Input</i>	Sumber-sumber yang digunakan dalam setiap tahapan kegiatan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Buku-buku pedoman - Masyarakat miskin - Anggaran - Pengelola
	3. <i>Process</i>	Pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Rembug Kesiapan Masyarakat - Tahap Pendaftaran Relawan - Tahap Refleksi Kemiskinan - Tahap Pemetaan Swadaya - Tahap Pembentukan Tim Pengendali Program RW - Tahap Penguatan BKM - Tahap Perencanaan Partisipatif RW - Tahap Perencanaan Partisipatif Kelurahan - Tahap Musrenbang Kelurahan
	4. <i>Product</i>	Hasil dari setiap tahapan kegiatan, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman masyarakat tentang PNPM Mandiri Perkotaan - Partisipasi masyarakat, termasuk perempuan - Kesepakatan-kesepakatan - Relawan yang terjaring - Anggota BKM yang terpilih - Surat permintaan bantuan teknik ke Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Bappekot (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) - Data masyarakat miskin - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) - Visi, Misi, Tujuan, dan Aturan Kelompok - Anggota Tim Pengendali Program RW - AD/ART BKM - Anggota Tim Perencanaan Partisipatif RW - Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (RTPK) RW - Rencana Program Tahunan - Anggota Tim Perencanaan Partisipatif Kelurahan - Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seperti ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini

Tabel 3 Pemetaan Informan

Tahap	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Rembug Kesiapan Masyarakat	1. Lurah 2. Fasilitator	1. Ketua RR 2. Ketua RT 3. Tokoh Masyarakat 4. Perwakilan Organisasi Masyarakat 5. Perwakilan Warga 6. Perangkat Kelurahan 7. Dewan Kelurahan	
Penentuan Relawan	1. Perangkat Kelurahan 2. Fasilitator	1. Perwakilan Warga 2. Perwakilan Warga Perempuan	3. Relawan
Refleksi Kemiskinan	1. Perangkat Kelurahan 2. Relawan (Tim Refleksi Kemiskinan) 3. Fasilitator		
Pemetaan Swadaya	1. Lurah 2. Fasilitator	Tim Pemetaan Swadaya	Kelompok Swadaya Masyarakat
Pembentukan Tim Pengendali Program	1. Relawan 2. Fasilitator 3. Perangkat RW	Perwakilan Warga	Tim Pengendali Program RW
Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1. Lurah 2. Relawan 3. Fasilitator 4. Perangkat Kelurahan (LPM) 5. Dewan Kelurahan	Tim Pengendali Program RW	Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Perencanaan Partisipatif RW	1. Fasilitator 2. Ketua RW	1. Perwakilan Warga 2. Perwakilan Warga Perempuan 3. Perangkat RW	Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW
Perencanaan Partisipatif Kelurahan	1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 2. Lurah	1. Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW 2. Perwakilan Warga 3. Perwakilan Warga Perempuan 4. Perangkat Kelurahan	Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) Kelurahan
Musrenbang Kelurahan	1. Lurah 2. Dewan Kelurahan 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 4. Fasilitator	1. Tim Perencanaan Partisipatif (TPP) RW 2. Perwakilan Warga 3. Perwakilan Warga Perempuan 4. Perangkat Kelurahan	

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Wawancara; dilakukan secara mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan guna mengetahui tahapan pelaksanaan PNPM-MP di lapangan.
- (2) Studi Kepustakaan (Dokumentasi); dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan bacaan berbagai buku, teori, jurnal, makalah ilmiah, dokumen, termasuk berbagai peraturan dan bahan rujukan lainnya yang dianggap relevan yang berkaitan dengan penelitian. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan melalui data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik bersumber dari dokumentasi maupun buku, koran, majalah mengenai pendapat, dan hukum yang berhubungan dengan konsep dasar tentang pembangunan masyarakat dan, partisipasi masyarakat. Studi dokumentasi diharapkan memberikan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data, maka peneliti disebut sebagai instrumen penelitian, yang didukung oleh alat bantu seperti alat tulis, *tape recorder*, kamera, serta peta.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

(1) Pemrosesan Satuan

Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu berupa data hasil pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, dan arsip dengan memilihnya untuk menemukan data yang diperlukan. Selanjutnya, dari masing-masing data yang telah ditelaah dari masing-masing sumber itu dibuat abstraksi berupa rangkuman inti.

(2) Kategorisasi

Data dikelompokkan atas dasar pikiran, intuisi, dan pendapat. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing. Metode yang digunakan dalam analisis adalah mengkomparasikan data yang diperoleh dari responden dan dokumentasi.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lima wilayah kota administratif di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Ada pun pemilihan kelurahan sebagai objek penelitian didasarkan pada kelurahan yang mempunyai BKM dengan kinerja sangat baik, memadai, dan tidak memadai. Lokasi penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Lokasi Penelitian

Kota	Kecamatan	Kelurahan
Jakarta Utara	Cilincing	Sukapura
		Cilincing
Jakarta Timur	Pasar Rebo	Kalisari
	Cipayung	Pondok Ranggan
	Jatinegara	Cipinang Muara
Jakarta Selatan	Pasanggrahan	Ulujami
	Pasar Minggu	Ragunan
	Cilandak	Pondok Labu
Jakarta Barat	Tambora	Rawa Malaka
	Tamansari	Krukut
		Mangga Besar
	Cengkareng	Kali Angke
Kapuk		
Jakarta Pusat	Sawah Besar	Karang Anyar
	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan
	Menteng	Pegangsaan

3. Temuan Penelitian

Tabel 5 berikut memperlihatkan hasil evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan model *CIPP*.

Tabel 5 Hasil Evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta

Tahapan Program	Context	Input	Process	Product
Rembug Kesiapan Masyarakat	Tujuan: untuk menyatakan kesiapan warga melaksanakan PNPM-MP; belum sepenuhnya tercapai, masyarakat masih ragu bahwa PNPM-MP untuk masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap; tetapi belum sepenuhnya dipedomani - Peserta; keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan PNPM MP sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lokasi - Keterlibatan perangkat kelurahan bervariasi tergantung lokasi, ada kecenderungan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara prosedural rembug kesiapan masyarakat sudah berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman - Pembuatan surat permohonan bantuan teknik lebih banyak inisiatif fasilitator, masyarakat belum sepenuhnya merasa terlibat, masih bersifat pasif 	Surat permohonan bantuan teknik ke KMW dan Bappekot; belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat masih rendah
Penentuan Relawan	Tujuan: memperoleh relawan yang melibatkan perempuan minimal 30%; ada yang berhasil dan ada pula yang belum	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah ada - Masyarakat belum sepenuhnya bersedia mencalonkan diri sebagai relawan, cenderung ditunjuk - Peran fasilitator sangat dominan 	Proses cenderung langsung menunjuk, belum sesuai prosedur dan kriteria yang seharusnya	Terpilihnya relawan; pada lokasi tertentu keterwakilan perempuan sangat tinggi (di atas 80%), lokasi lain sangat rendah (di bawah 30%), secara keseluruhan masih rendah
Refleksi Kemiskinan	Tujuan: memetakan masyarakat miskin; bersifat subjektif tergantung pada definisi kemiskinan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Tim Refleksi Kemiskinan belum sepenuhnya memahami tupoksinya - Data masyarakat miskin kurang lengkap dan kurang akurat 	Tim Refleksi Kemiskinan cenderung langsung memetakan kemiskinan tanpa klarifikasi data kemiskinan yang ada	Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan; kadang masih belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat miskin

Pemetaan Swadaya	Tujuan: mengidentifikasi potensi dan membentuk KSM rata-rata sudah tercapai dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator cukup dominan - Keterlibatan masyarakat masih rendah - Pagu anggaran kurang realistis 	Proses pemetaan swadaya masih belum mencerminkan potensi yang sebenarnya	Terbentuknya KSM; masih berasal dari kelompok masyarakat yang sama dengan relawan dan Tim Refleksi Kemiskinan
Pembentukan Tim Pengendali Program	Tujuan: membentuk TPP yang diambil dari para relawan; rata-rata sudah tercapai dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator cukup dominan - Keterlibatan masyarakat masih rendah 	Proses pembentukan Tim Pengendali Program langsung dilakukan melalui penunjukan	Terbentuknya TPP; masih berasal dari kelompok masyarakat yang sama dengan relawan dan Tim Refleksi Kemiskinan
Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Tujuan: memilih anggota BKM yang baru; rata-rata sudah tercapai dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Kehadiran TPP RW cukup baik - Fasilitator tetap dominan 	Proses sudah sesuai prosedur	Terpilihnya anggota BKM; diambil dari TPP RW
Perencanaan Partisipatif RW	Tujuan: menyusun RTPK; rata-rata sudah tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator masih dominan - Keterlibatan masyarakat miskin masih rendah 	Proses sudah berjalan sesuai pedoman, karena peran fasilitator cukup dominan, tetapi keterlibatan aktif masyarakat masih rendah	Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan; masih dianggap kurang mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya
Perencanaan Partisipatif Kelurahan	Tujuan: menyusun PJM Pronangkis; rata-rata sudah tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator masih dominan - Keterlibatan masyarakat miskin masih rendah 	Proses sudah berjalan sesuai pedoman, karena peran fasilitator cukup dominan, tetapi keterlibatan aktif masyarakat masih rendah	PJM Pronangkis; masih dianggap kurang mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya

Musrenbang Kelurahan	Tujuan: koordinasi supaya PJM Pronangkis diakui sebagai program kelurahan; rata-rata sudah tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Buku pedoman sudah lengkap - Peran fasilitator masih dominan - Ketrelibatan masyarakat miskin masih rendah 	Proses sudah berjalan sesuai pedoman, karena peran fasilitator dan kelurahan cukup dominan, tetapi keterlibatan aktif masyarakat masih rendah	PJM Pronangkis sebagai program kelurahan; masih dianggap kurang mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya
----------------------	---	--	---	--

4. Pembahasan

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat masyarakat secara prosedural rata-rata sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah dan persyaratan secara normatif juga sudah terpenuhi. Jadi dilihat dari konteksnya, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan secara umum dapat tercapai. Beberapa hal yang tingkat pencapaiannya masih relatif rendah adalah: pemahaman masyarakat miskin tentang PNPM MP masih perlu ditingkatkan lagi, mereka masih meragukan bahwa PNPM MP mampu mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta, bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pun masih diragukan. Kesulitan lain adalah pemetaan masyarakat miskin yang akan dibantu oleh PNPM-MP belum sepenuhnya mencapai sasaran, sehingga berpengaruh pada penentuan KSM sebagai target PNPM-MP juga menjadi kurang tepat.

Tentu saja kelemahan di atas tidak lepas dari hasil evaluasi dari sisi input, yaitu kurangnya peran masyarakat miskin dalam tahapan pelaksanaan PNPM-MP. Walaupun secara normatif sudah tersedia buku pedoman yang lengkap, tetapi pada prakteknya bukanlah hal yang mudah untuk menggerakkan masyarakat supaya terlibat aktif dalam pelaksanaan PNPM-MP. Tentu banyak faktor penyebabnya, tetapi penyebab utama yang ditemukan di lapangan adalah ketidakyakinan masyarakat akan keberhasilan PNPM-MP serta tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah membuat mereka lebih susah untuk dimotivasi. Di samping itu pagu anggaran yang dialokasikan untuk PNPM Mandiri masih kurang, sehingga masyarakat miskin yang bisa tersentuh oleh program ini relatif sedikit.

Sedangkan dari evaluasi proses, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan sesuai tahapan PNPM-MP sudah berjalan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari peran fasilitator yang dominan, dan pada dasarnya ada target-target yang harus dicapai oleh fasilitator tersebut. Ada dampak negatif dari keharusan target tercapai yaitu munculnya fenomena yang penting pekerjaan selesai, tanpa memperhatikan esensi dari program tersebut. Proses pendampingan untuk kemandirian masyarakat masih perlu dicari polanya, karena dominasi peran fasilitator membuat pemberdayaan masyarakat yang diinginkan sesuai tujuan PNPM-MP hanya menjadi angan-angan belaka.

Hasil evaluasi produk di antaranya adalah: adanya target yang harus dicapai dalam setiap tahapan pelaksanaan PNPM-MP menimbulkan hal positif, yaitu setiap tahapan dapat menghasilkan produk yang secara kuantitas dapat terpenuhi, tetapi secara kualitas masih perlu ditinjau kembali. Sebut saja surat permohonan bantuan teknik ke KMW dan Bappekot, Rencana Tindak Pengentasan Kemiskinan (RTPK), serta PJM Pronangkis masih belum mencerminkan kebutuhan real masyarakat miskin di DKI Jakarta. PJM Pronangkis seolah-olah didesakkan hanya untuk kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan, belum menyentuh hal-hal mendasar di masyarakat miskin. Keberadaan PJM Pronangkis yang lemah legalitasnya walaupun berhasil didudukkan sebagai salah satu perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah, secara hukum sangat ambigu dalam konstelasi perencanaan daerah.

5. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian yang cukup panjang akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Hasil evaluasi dari sisi konteks adalah secara prosedural PNPM Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta sudah dilaksanakan dengan baik. Dari sisi input, terdapat hal-hal positif, yaitu: tersedianya buku pedoman, anggaran yang memadai, serta keterlibatan masyarakat sudah ada walau masih harus ditingkatkan, sedangkan hal-hal yang masih menghambat adalah: buku pedoman masih bersifat normatif, alokasi anggaran yang kurang realistis, peran fasilitator terlalu dominan, serta partisipasi masyarakat masih harus ditingkatkan. Dari sisi proses dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan PNPM MP sudah berjalan dengan baik. Walaupun dari sisi produk terlihat bahwa setiap tahapan dapat menghasilkan produk yang secara kuantitas dapat terpenuhi, tetapi secara kualitas masih perlu ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2007): Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri – Perkotaan.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2011): Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri – Perkotaan 2011 Khusus Provinsi DKI Jakarta.
- Mardapi, D. (2000). Evaluasi Pendidikan. Makalah disampaikan pada Konvensi Pendidikan Nasional tanggal 19-23 September 2000 di Universitas Negeri Jakarta.
- Oriondo, L.L. & Antonio, E. M.D. (1998). *Evaluating educational outcomes (Test, measurement and evaluation)*, Florentino St: Rex Printing Company, Inc.
- Permana, E. (2010). Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok), Tesis, tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- Sari, L.P. (2009): Studi Evaluasi Keberhasilan Program Bebenah Kampung Berdasarkan Penilaian Masyarakat (Penilaian dari Aspek Fisik, Sosial, dan Ekonomi), Skripsi, tidak dipublikasikan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Indonusa Esa Unggul.
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Stufflebeam, D.L. & Coryn, L.S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Application*, Second Edition, A Wiley Brand One Montgomery Street, Suite 1200, San Fransisco.